

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Pentingnya pemberian bantuan sosial oleh pemerintah kepada korban kebakaran sebagai respons yang mendesak terhadap bencana ini. Bantuan sosial tidak hanya memberikan perlindungan materiil yang diperlukan seperti tempat tinggal sementara, makanan, dan pakaian, tetapi juga mendukung pemulihan psikologis korban dari trauma yang mereka alami. Selain itu, pemerintah memiliki tanggung jawab moral dan sosial untuk mengurangi dampak sosial dan ekonomi jangka panjang bagi korban kebakaran, serta memastikan kesejahteraan mereka dalam jangka waktu yang lebih panjang. Dalam konteks ini, bantuan sosial tidak hanya berfungsi sebagai tindakan kemanusiaan, tetapi juga sebagai strategi penting untuk membangun kembali kehidupan korban kebakaran dan memastikan keadilan sosial dalam masyarakat.

Ketentuan hukum di Kota Samarinda memainkan peran krusial dalam pemenuhan bantuan sosial bagi korban kebakaran. Dengan mempertimbangkan aspek hukum seperti regulasi dan kebijakan yang terkait, pentingnya kejelasan dan kepastian dalam proses penyaluran bantuan sosial menjadi terlihat. Pemerintah Kota Samarinda, melalui peraturan dan mekanisme yang ada, bertanggung jawab untuk memastikan bahwa korban kebakaran mendapatkan bantuan yang tepat waktu dan memadai sesuai dengan kebutuhan mereka. Pemahaman yang baik

tentang kerangka hukum ini tidak hanya mendukung efisiensi dalam penyaluran bantuan, tetapi juga mendorong akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan sumber daya publik. Dengan demikian, implementasi ketentuan hukum yang jelas dan berbasis pada prinsip-prinsip keadilan sosial sangat penting untuk memastikan bahwa korban kebakaran di Kota Samarinda dapat mendapatkan dukungan yang mereka perlukan dalam menghadapi tantangan setelah terjadinya bencana kebakaran.

4.2. Saran

Pastikan pemerintah terbuka dalam memberikan informasi bantuan sosial ini sehingga mudah di akses untuk semua kalangan yang terdampak bencana kebakaran. Libatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan terkait bantuan dan sosialisasikan hak-hak dasar prosedur pengaduan kepada masyarakat melalui *leaflet* atau pertemuan sederhana di tingkat komunitas, sehingga mereka tahu cara untuk melindungi hak-hak mereka sendiri. Serta dukung kerja sama aktif pemerintah, organisasi non-profit, dan sukarelawan lokal untuk memastikan bantuan disalurkan dengan efisien dan tepat waktu kepada korban bencana kebakaran di Kota Samairinda.

Salah satu elemen kunci dalam memberikan perlindungan hukum bagi pemenuhan bantuan sosial kepada korban bencana kebakaran adalah sosialisasi mengenai pengurangan risiko kebakaran. Sosialisasi ini harus tersedia untuk seluruh kelompok masyarakat, karena dianggap sebagai satu-satunya metode untuk menciptakan perasaan integrasi dan pemberdayaan. Selain sosialisasi yang dilakukan terhadap pengurangan risiko kebakaran ini, ada juga hak-hak

konstitusional dan hak asasi manusia yang harus dijaga dalam konteks upaya tanggap dan pemulihan bencana. Hal ini termasuk akses ke layanan penting seperti layanan kesehatan, pembayaran, jaminan sosial, dan kredit.